

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di berbagai sektor ekonomi diharapkan menunjukkan kepada keadaan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama di wilayah negara Indonesia yang terdiri dari beribu ribu pulau dari pulau Miamas sampai pulau Rote. Sehingga sangat menyulitkan untuk pembangunan yang serentak dalam jangka waktu tertentu.

Kita lihat saja di masa tahun 2006- 2014 dahulu pembangunan pada masa itu hanya difokuskan di pulau-pulau yang mudah di jangkau misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali. Sedangkan pulau yang lain tidak terjamah untuk dimasukkan ke dalam roda pembangunan, sehingga hal itu terlihat pembangunan yang tidak merata. Investor yang berani masuk ke Indonesia harus menganggarkan dana investasi yang lebih besar untuk mendukung infrastruktur yang sangat minim di daerah investasi yang mereka sedang jalankan atau sedang ditargetkan.<sup>1</sup> Masih meradangnya fenomena ini menjadikan investor asing berpikir dua kali untuk melakukan investasi di Indonesia.

Kondisi perekonomian global mengalami ketidakstabilan sejak pertengahan tahun 2007 hingga 2013 hal ini sangat berdampak pada ke adaan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh trend peningkatan krisis keuangan global yang cukup tajam ke arah yang membahayakan keseimbangan perekonomian dunia.

---

<sup>1</sup> Dhian Ihsan, "Investasi Lesu karena Infrastruktur Indonesia Tertinggal", 10 Mar 2017, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/Rb11Bj1N-investasi-lesu-karena-infrastruktur-indonesia-tertinggal>, di akses pada 16 Mei 2018

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia sangat dirasakan pada akhir tahun 2008.<sup>2</sup> Penanaman modal asing langsung pada tahun 2009 menurun sebesar minus 32,9 persen dalam kondisi ini penurunan terjadi pada sektor perindustrian dan pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Melemahnya pembentukan investasi mendorong penurunan tingkat pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah sebagai akibat dari krisis keuangan global. Pada tahun 2008 arus investasi secara cenderung melambat. Penurunan investasi dalam bidang infrastruktur dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan perindustrian terus terjadi pada tahun 2009. Akibat dari penurunan ekspansi yang menyebabkan resesi global di tahun 2009, sehingga investasi langsung asing anjlok.

Melihat struktur penanaman modal dalam negeri yang *sempat* anjlok hingga hingga 39,3% pada tahun 2008 dikarekan investasi dalam bidang infrastruktur yang jatuh terutama sektor ekonomi konstruksi yang paling banyak menyumbang penurunan. Menandakan pelaku bisnis dalam negeri mengalami krisis pada sektor ekonomi tersebut. Oleh sebab itu sekarang kita harus berpikir bagaimana meningkatkan pelaku bisnis guna mensejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan pengusaha yang bermasalah *justru* pengusaha besar. Dimana banyak kredit macet. Sulitnya pengembalian modal dikarenakan daya beli yang rendah dari masyarakat.

Sayangnya sampai saat ini kendala yang dihadapi oleh pelaku bisnis ialah bentuk dari perizinan usaha. Lebih dari 60% pelaku bisnis belum mengantongi

---

<sup>2</sup> BAPPENAS. 2009. *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS, 2009) h. 5

izin usaha karena sebagian besar dari mereka mengaku masih kesulitan untuk mengurusnya.<sup>3</sup> Proses perizinan yang relatif panjang dan membutuhkan biaya yang tak sedikit membuat pelaku bisnis kesulitan mendapatkan izin usaha. Kebanyakan pelaku bisnis masih beranggapan bahwa perizinan usaha hanya sebatas pendataan tertulis. Pikiran ini yang harus bisa dirubah oleh pemerintah dengan mengedukasi kepada pelaku bisnis mengenai kelebihan memiliki izin usaha seperti mendapat kemudahan akses mengikuti pelatihan, pembinaan, pameran dan bantuan permodalan.

Berdasarkan dengan pembahasan di atas, investasi menjadi salah satu tolok ukur kinerja perekonomian Indonesia pada perspektif global. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif dengan ekspansi bisnis. Agar penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar di Indonesia ekspansi bisnis semestinya harus ditingkatkan.

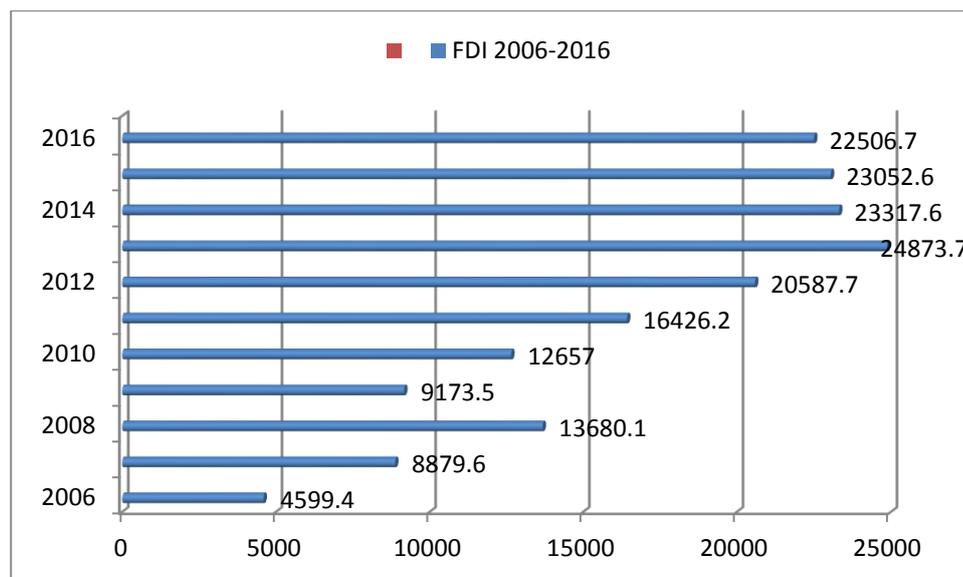
Mengingat pentingnya peranan penanaman modal menandakan bahwa investasi harus menjadi prioritas utama dalam mengembangkan bisnis dari berbagai sektor ekonomi yang berbeda dari investasi yang ada. Penurunan penanaman modal di Indonesia, mengharuskan pemerintah menaruh strategi serta kebijakan yang sepadan untuk menanggulangi agar investasi terus mengalami perkembangan ke ranah yang positif dari tahun ke tahun.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*). Akumulasi modal

---

<sup>3</sup> Bisnisumkm, "Masih dianggap susah 60% UMKM di Indonesia belum punya izin usaha", 21 November 2017, <https://bisnisumkm.com/masih-dianggap-susah-60-umkm-indonesia-belum-punya-izin-usaha.html>, diakses pada 24 Maret 2018.

atau pembentukan modal terjadi ketika sebagian pendapatan disimpan dan diinvestasikan kemudian hari dengan tujuan memperoleh output dan pendapatan yang lebih besar. Pembentukan modal membantu ketercapaian dalam meningkatkan produksi suatu negara. Pembentukan modal dihimpun dengan cara investasi. Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang memiliki tujuan untuk mengolah dan menambah barang-barang modal dalam kegiatan perekonomian yang akan digunakan untuk menghasilkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang.



Sumber : BPS, diolah oleh peneliti 2018

**Gambar I.1**

### **Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi**

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa dari tahun ketahun realisasi penanaman modal di Indonesia memiliki grafik yang fluktuatif. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2007 realisasi PMA meningkat mencapai hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dimana pada saat tahun 2006 realisasi PMA sebesar 4599,4

Juta US\$ sementara tahun 2007 menjadi 8879,6 juta US\$ . Kembali memperoleh peningkatan di tahun 2008 sebesar 13680,1 juta US\$ . Pada tahun 2009 realisasi PMA kembali anjlok diangka 9173,5 Juta US\$, kemudian pada tahun 2010 sebesar 12657 Juta US\$. Pada tahun berikutnya realisasi PMA tahun 2011 meningkat 29,7% berdasarkan tahun sebelumnya. Sementara ditahun 2013 realisasi PMA sebesar 24873,7 Juta US\$. Hal ini menandakan adanya peningkatan yang baik mencapai 20,81% berdasarkan tahun sebelumnya. Namun mulai tahun 2014 realisasi PMA berangsur-angsur semakin mengalami penurunan hingga tahun 2016. Yaitu di tahun 2014 jumlah penanaman modal asing langsung hanya mencapai 23317,6 juta US\$ . Kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 23052,6 juta US\$, terus menurun pada tahun 2016 hingga sebesar 2,36%. Tingkat realisasi PMA yang tergambarkan setiap tahunnya di Indonesia merupakan aktivitas perekonomian yang memaparkan bahwa FDI merupakan akses penting agar adanya peningkatan pembangunan dari berbagai sektor ekonomi.

Berangkat dari data realisasi penanaman modal asing langsung yang terpapar penurunan atau kemerosotan tertinggi terjadi pada tahun 2009 hingga 32,94%. Melihat bahwa pada tahun sebelumnya di 2008 realisasi penanaman modal mencapai 13680,1 Juta US\$ menjadi 9173,5 Juta US\$. Dilansir bahwa memasuki tahun 2009 pengusaha memilih untuk tidak melakukan ekspansi dan investasi karena imbas krisis global<sup>4</sup> . Sehingga penurunan pada sektor ekonomi perindustrian, transportasi, pergudangan dan komunikasi menjadi sumbangsih terbesar dari penurunan pada tahun 2009 tersebut. Sementara penurunan FDI juga

---

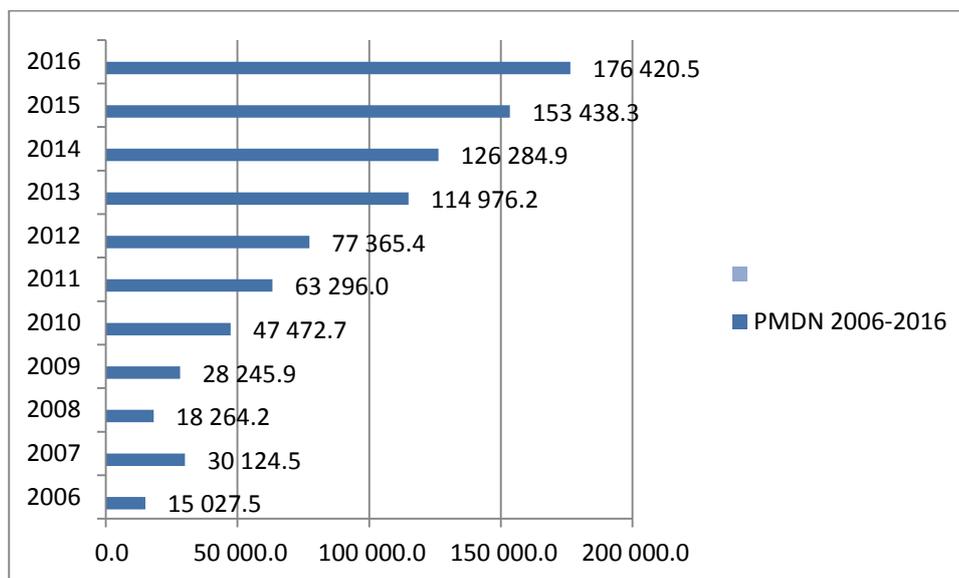
<sup>4</sup> Kpl, Merdeka, "2009, Pengusaha Pilih Tak Ekspansi", 4 Januari 2009, <https://www.merdeka.com/uang/2009-pengusaha-pilih-tak-ekspansi.html>, diakses pada 11 Pebruari 2018.

terjadi pada tahun 2016, dikarenakan investor asing masih menunggu kepastian langkah pemerintah untuk deregulasi sehingga investor luar tampak *wait and see*.<sup>5</sup> Berimbas kepada penurunan bidang infrastruktur pada sektor ekonomi instalasi listrik, gas dan air yang mengalami penurunan. Permasalahan yang membuat FDI menurun terjadi dari berbagai peristiwa yang membuat investor asing takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena menghindari situasi yang tidak di harapkan oleh para investor sebagai bentuk antisipasi. Dengan adanya permasalahan ini menandakan bahwa Indonesia belum sesuai dengan skala harapan investor untuk menanamkan modalnya langsung di Indonesia.

Berpandangan dari pembahasan di atas dengan perkataan lain, investasi yang mengalami penurunan yakni dalam bidang infrastruktur, melihat bahwa sektor ekonomi perindustrian, listrik, gas, air, transportasi, pergudangan dan komunikasi yang mengalami kemerosotan yang tajam. Untuk mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan investasi dalam bidang ini, pemerintah telah mengupayakan kebijakan yang mengarah ke dalam konteks memudahkan membuka usaha atau bisnis yang ranahnya akan mendorong peningkatan investasi dengan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dengan adanya kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk menjawab tantangan- tantangan perekonomian secara global.

---

<sup>5</sup> Daud, Ameydio, "Pertama dalam 5 Tahun, Investasi Asing di Indonesia Menurun", 25 April 2016, [katadata.co.id/berita/2016/04/25/tunggu-kepastian-investasi-asing-turun-dalam-negeri-naik](http://katadata.co.id/berita/2016/04/25/tunggu-kepastian-investasi-asing-turun-dalam-negeri-naik), diakses pada 17 Mei 2018.



Sumber : BPS, diolah peneliti .2018

**Gambar I.2**

### **Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi**

Berangkat dari data di atas menggambarkan grafik penanaman modal dalam negeri bidang infrastruktur yang fluktuatif namun cenderung mengalami perubahan ke arah yang baik dimulai dari tahun 2006 - 2016 dapat dilihat grafik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Meskipun pada tahun 2008 mengalami penurunan esktrim sebesar 39,3% dari tahun sebelumnya mencapai 30124,5 miliar rupiah menjadi sebesar 18264,2 miliar rupiah. Dimana pada tahun 2008 ini jelas menggambarkan bahwa penurunan angka terbesar dari PMDN dikarenakan tingginya pajak perusahaan di Indonesia menjadi pertimbangan investor karena besarnya cukup tinggi mencapai 30%, Faktor lain turunnya angka PMDN ini karena minimnya dana di perbankan yang disalurkan ke sektor riil.<sup>6</sup> Diterangkan pada data pada tahun 2008 pada sektor ekonomi pertambangan,

<sup>6</sup> Irqom, "Investasi PMDN Anjlok, PMA Lampau Target", Sabtu, 20 Sep 2008, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1009369/>, di akses pada 17 Mei 2018.

penggalian, perindustrian, konstruksi, listrik, gas, dan air secara bersamaan mengalami penurunan angka investasi. Hal ini menandakan bahwa terjadi kemerosotan proyek dari sisi infrastruktur.

Berdasarkan dari data yang terpapar diatas, bisa dikatakan bahwa tren penanaman modal dalam negeri secara kolosal dari tahun ke tahun hampir selalu mengalami kenaikan. Sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan fakta yang terjadi dilapangan, dimana banyak fenomena – fenomena yang menyulitkan untuk melaksanakan penanaman modal dalam negeri salah satunya yakni, izin usaha yang masih menjadi beban dengan *rumitnya* prosedur serta tidak ada kejelasan biaya yang pasti untuk memperoleh izin usaha.

Dikarenakan pada saat ini banyak sekali pelaku bisnis yang bermunculan namun tidak di barengi dengan pengetahuan yang mengenai hal- hal *crusial* yang bisa menjadikan PMDN lebih meningkat. Apabila pelaku bisnis memiliki izin usaha dan pelatihan, maka besaran angka PMDN di Indonesia akan lebih meningkat.

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal atau investasi melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah dari segi informasi. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan yang justru semakin memberikan beban bagi kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing Indonesia makin menurun. Untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam prakteknya terdapat *substansi* yang masih memberatkan dunia usaha kusus

nya dalam hal kesepatan modal awal yang harus dimiliki oleh Perseroan Terbatas paling sedikit senilai Rp 50.000.000,- . hal tersebut memberatkan bagi dunia usaha, khususnya pengusaha pemula.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu adanya perubahan terhadap modal dasar Perseroan Terbatas yang semula ditentukan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas, yaitu dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Pasal 1:

“Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.”<sup>7</sup>

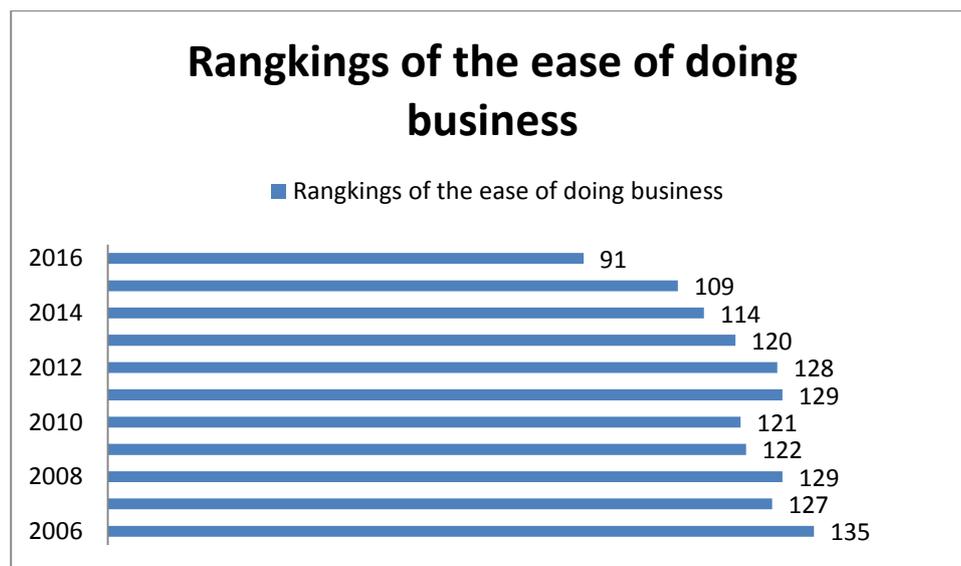
Rancangan kebijakan yang diperbaharui oleh pemerintah memiliki maksud dan tujuan agar pengusaha semakin dimudahkan untuk membuka usaha sebagai wujud dari investasi. Baik itu pengusaha yang berasal dari dalam negeri maupun pengusaha asing yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia untuk langsung membuka usahanya secara jangka panjang. Selain perbaharuan dari modal dasar, juga pemerintah mempunyai perbaharuan dalam perspektif yang juga tak kalah penting yaitu perizinan. Kalau sebelumnya harus melewati 17 prosedur yang makan waktu 210 hari dengan biaya Rp 86.000.000’- untuk mengurus 4 izin

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 2016, *Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2016) h. 2

(IMB, UKL/UPL, SLF, TDG), kini hanya ada 14 prosedur dalam waktu 52 hari dengan biaya Rp 70.000.000<sup>8</sup> - untuk 3 perizinan (IMB, SLF, TDG).<sup>8</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyinggung dalam peningkatan peringkat kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* ditargetkan harus mencapai ke peringkat 40, dengan mengeluarkan paket kebijakan XII. Paket kebijakan XII mempunyai cakupan yang sangat luas bagi perbaikan kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* di Indonesia, baik itu dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya.



Sumber : World Bank, diolah Peneliti 2018.

**Gambar I.3**

### **Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Tahun 2006-2016**

Berdasarkan data diatas dapat terlihat jelas terjadi fluktuasi dalam peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia pada tahun 2006 tercatat mendapati di

<sup>8</sup> Kemendikbud, “*PAKET KEBIJAKAN XII Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha*”, 29 April 2016, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha> tanggal 11 Pebruari 2018 pukul 14.28 WIB.

peringkat 135 dari 189 negara. Di tahun 2007 naik 8 peringkat ke 127, kemudian di tahun 2008 mengalami penurunan ke peringkat 129, selanjutnya ditahun 2009 mengalami peningkatan di peringkat 122 diikuti tahun berikutnya yang naik ke peringkat 121, tahun 2011 kembali mengalami penurunan di peringkat 129, diikuti tahun selanjutnya peringkat 128, di tahun 2013 berada di peringkat 120 , kemudian di tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi peringkat 114, terus meningkat yang baik di tahun 2015 mencapai peringkat 109 , semakin mengalami lonjakan peringkat di tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 sampai naik ke 18 peringkat langsung menduduki peringkat 91 dari 189 negara.

Dilihat dari pemaparan peringkat data *ease of doing business* keseluruhan ritme yang di bangun menandakan peningkatan dalam satu decade ke arah yang sangat positif. Dimana dalam enam tahun terakhir selalu mengalami peningkatan peringkat, bahkan di tahun 2016 tercatat mencapai peringkat 91. Peringkat di tahun 2016 mencatat tertinggi dalam satu decade tersebut. Meskipun dalam hal ini peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih kalah dibanding negara-negara Asean seperti Singapura yang di peringkat ke-2, Malaysia ke-23, Thailand ke-46, Brunei Darussalam ke-72, dan Vietnam ke-82.<sup>9</sup> Mengingat bahwa di tahun tersebut pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XII yang terkonsentrasi untuk *ease of doing business* atau meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Namun peringkat yang di hasilkan masih jauh dari hal yang ditargetkan dimana Indonesia dengan adanya paket kebijakan XII ini optimis akan mendudukin peringkat 40 dari 189 negara. Dengan adanya kenaikan

---

<sup>9</sup> Yosi Winosa, Berita Satu, “Kemudahan Berbisnis di Indonesia Melejit 15 Peringkat”, 27 Oktober 2016, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/395179/>, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2018.

peringkat kemudahan berbisnis juga mengharapkan meningkatannya investasi baru yang bermunculan. Fenomena lonjakan peringkat *ease of doing business* yang meningkat sampai ke 18 peringkat seharusnya menjadikan investasi juga meningkat, baik itu investasi dalam negeri juga investasi asing langsung yang masuk di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan data realisasi penanaman modal asing yang ada di Indonesia pada tahun 2016 yang mengalami penurunan hingga 2,36% berdasarkan tahun sebelumnya. Seharusnya dengan berbagai perubahan kebijakan untuk mencapai kemudahan berbisnis mampu meningkatkan penanaman modal atau investasi yang ada di Indonesia ikut menunjukkan peningkatan ke angka yang positif dan sejalan dengan lonjakan peringkat kemudahan berbisnis.

Sejalan dengan uraian diatas, bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi investasi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang masalah investasi asing langsung di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka didapatkan fokus penelitian beberapa masalah yang mempengaruhi penanaman modal asing langsung dan penanaman modal dalam negeri sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kemudahan berbisnis terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kemudahan berbisnis terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh antara kemudahan berbisnis terhadap infrastruktur di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kemudahan berbisnis terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah yang menyebabkan penurunan investasi asing langsung di Indonesia sangat luas. Berhubungan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi dana dan waktu, maka penelitian ini di batasi hanya pada masalah “Pengaruh Kemudahan Berbisnis Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemudahan berbisnis terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kemudahan berbisnis terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia?
3. Bagaimana besaran perbandingan antara pengaruh kemudahan berbisnis terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia dengan pengaruh kemudahan berbisnis terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia ?

## **E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan pengetahuan baru mengenai apa saja yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, bahan pertimbangan, masukan serta referensi dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan ekonomi, baik dalam rangka mengontrol dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan maupun dalam rangka membuat perencanaan ke depan sehingga langkah-langkah kebijakan dalam bidang ekonomi yang ditempuh dapat mengatasi permasalahan penanaman modal baik itu modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang terjadi di Indonesia .